

# PATOLOGI BIROKRASI

Oleh

H. Mu'min Ma'ruf \*)

---

## ABSTRAK

Patologi Birokrasi adalah sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi sudah ada dan terpelihara sejak lama. Birokrasi sudah terbiasa menjadi simbol kemakmuran dan kerajaan bagi aparatnya untuk mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Kultur pangreh praja (rakyat mengabdikan pada pemerintah/raja) sudah ada dan bersemayam di birokrasi zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, dan birokrasi yang diciptakan untuk melayani penguasa sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan sekarang (era reformasi).

Membangun sistem kontrol dan akuntabilitas publik menjadi signifikan dalam memerangi patologi birokrasi. Sebagai "eksekutor" kekuasaan birokrasi sangat mudah terbuai dan tergoda untuk melakukan "*abuse of power*". Untuk itu dalam menghadapi berbagai gejala empirik patologi dalam birokrasi, sudah saatnya diupayakan agar birokrasi memiliki daya tahan yang semakin tinggi terhadap berbagai penyakit yang menyerangnya, juga reformasi birokrasi harus dilakukan secara radikal dan komprehensif, karena pada dasarnya patologi birokrasi yang terjadi tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga melibatkan para penegak hukum para politisi dan yang lainnya.

Kata kunci: Terapi radikal, komprehensif, good governance.

## PENDAHULUAN

Pada mulanya, istilah “patologi” hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit. Namun belakangan hari analogi ini dikenal dalam birokrasi, dengan makna agar birokrasi pemerintahan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang bersifat politis, ekonomi, sosio kultural dan teknologi, berbagai penyakit yang mungkin sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi pengobatan yang paling efektif. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi. Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita “penyakit birokrasi sekaligus”(Teruna,2007).

Dalam paradigma Actonian dinyatakan *power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan yang absolut pasti korup) secara implisit juga menjelaskan birokrasi dalam hubungannya dengan kekuasaan akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan wewenangnya (Ismail, 2009).

Dalam hal tersebut, selain sistem, bisa juga aparaturnya. Contoh konkrit dari masalah tersebut, yaitu kasus yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan publik dewasa ini tentang bagaimana Gayus Tambunan sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III a dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan mendadak menjadi orang yang terkenal saat ini di Indonesia. Bukan karena prestasinya di birokrasi meningkatkan penerimaan pajak, melainkan justru karena perbuatannya telah memperkokoh keyakinan tentang buruknya birokrasi di Indonesia.

Tidak semua birokrat seperti Gayus Tambunan, tetapi kelemahan sistem organisasi seperti dituliskan oleh Caiden, seorang pakar ternama reformasi administrasi, bahwa gejala tersebut mengidentifikasi telah terbentuk citra menyeluruh mengenai buruknya birokrasi di Indonesia(Eko Prasoj,2010).

Mal-administrasi yang saat ini mungkin dapat disebut GAYUISME atau nama lain yang barangkali akan segera muncul sebenarnya bukanlah kesalahan yang bersifat individual, tetapi timbul karena kelemahan sistematis dari organisasi birokrasi. Yaitu kelemahan dan kegagalan organisasi dalam membentuk sistem yang mencegah terjadinya penyakit-penyakit birokrasi (patologi birokrasi), sehingga menyebabkan munculnya perilaku menyimpang yang diterima secara kolektif.

Fenomena Gayus, dan nama-nama birokrat lain yang akan muncul serta menjadi bagian dari sindrom gayuisme adalah patologi birokrasi yang sudah menahun dan sistemis. Patologi ini seperti gurita, merusak sel-sel produktif dalam birokrasi dan melibatkan hampir semua pejabat dalam semua strata.

## **RUANG LINGKUP PATOLOGI BIROKRASI**

Ruang lingkup patologi birokrasi menurut Smith (1988) dalam Ismail (2009) dapat dipetakan dalam dua konsep besar, yaitu:

1. *Disfunctions of bureaucracy*, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.

2. *Mal-administration*, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi: perilaku korup, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.

Bentuk patologi birokrasi yang ditinjau dari perspektif perilaku birokrasi merefleksikan bahwa birokrasi sebagai pemilik kewenangan menyelenggarakan pemerintahan tentu memiliki kekuasaan “relatif” yang sangat rentan terhadap dorongan untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri dan kelompoknya yang diformulasikan atau diwujudkan dalam berbagai perilaku yang buruk.

Suatu perilaku dikatakan baik, bila secara universal semua orang bersepakat mengakui suatu perbuatan yang menunjukkan tingkah laku seseorang memang baik, sedangkan sebaliknya suatu perilaku dikatakan buruk, bila secara universal semua orang bersepakat menyatakan bahwa tingkah laku seseorang itu buruk. Karena hakikatnya hanya dua jenis perilaku yang ada dalam diri manusia, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk, yang kesemuanya itu tergantung dari manusianya sendiri. Dikaitkan dengan patologi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif perilaku, maka yang dijadikan indikator adalah berbagai perilaku buruk dari birokrasi itu sendiri.

Birokrasi diharapkan dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang mampu menumbuhkan kepercayaan publik, karena bagaimana pun pada akhirnya pelayanan publik produk dari suatu pemerintahan adalah terciptanya kepercayaan publik. Birokrasi tidak hanya sekedar

melaksanaan kekuasaan, tetapi juga memiliki tujuan moral, sebuah birokrasi yang menghargai hak-hak masyarakat (Teruna, 2007).

Proses patologi birokrasi yang akut diIndonesia ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi terpelihara sejak lama. Birokrasi sudah terbiasa menjadi simbol kemakmuran dan kerajaan bagi aparatnya untuk mendapat pelayanan dari masyarakat. Kultur *pangreh praja* (rakyat mengabdikan pada pemerintah/raja) ada di birokrasi zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan birokrasi yang diciptakan untuk melayani penguasa terjadi di zaman penjajahan.

Membangun sistem kontrol dan akuntabilitas publik menjadi signifikan dalam memerangi patologi birokrasi. Sebagai “eksekutor” kekuasaan birokrasi sangat mudah tergoda untuk melakukan *abuse of power*. Dalam penelitian Teruna (2007) dinyatakan bahwa salah satu ruang yang rentan terhadap patologi birokrasi berkenaan dengan proses pembangunan, khususnya penjabaran program ke dalam proyek-proyek pembangunan atau dikenal dengan istilah pengadaan barang dan jasa, seperti: tindakan *mark up*, penggelapan, manipulasi, suap, penyunatan dan sebagainya.

Selanjutnya Siagian (1994) mengelompokkan patologi birokrasi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi, seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan; persepsi atas dasar prasangka; mengaburkan masalah; menerima sogok; pertentangan kepentingan; cenderung mempertahankan *status quo*; *empire building*; bermewah-mewah; pilih kasih; takut pada perubahan, inovasi, dan resiko; penipuan; sikap sombong; ketidakpedulian

pada kritik dan saran; tidak mau bertindak; takut mengambil keputusan; sifat menyalahkan orang lain; tidak adil; intimidasi; kurang komitmen; kurang koordinasi; kurang kreativitas; kredibilitas trendah; kurangnya visi yang imajinatif; kedengkian; nepotisme; tindakan tidak rasional; bertindak diluar wewenang; paranoid; patronase; keengganan mendelegasikan; ritualisme; keengganan pikul tanggung jawab; dan xenophobia.

2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, seperti: ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan; ketidaktelitian; rasa puas diri; bertindak tanpa berpikir; kebingungan; tindakan yang tidak produktif; tidak adanya kemampuan berkembang; mutu hasil pekerjaan yang rendah; kedangkalan; ketidakmampuan belajar; ketidaktepatan tindakan; inkompetensi; ketidakcekatan; ketidakteraturan; melakukan tindakan yang tidak relevan; sikap ragu-ragu; kurangnya imajinasi; kurangnya prakarsa; kemampuan rendah; bekerja tidak produktif; ketidakrapian; dan stagnasi.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: penggemukan biaya; menerima sogok; ketidakjujuran; korupsi; tindakan kriminal; penipuan; kleptokrasi; kontrak fiktif; sabotase; tata buku tidak benar; dan pencurian.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: bertindak sewenang-wenang; pura-pura sibuk; paksaan; konspirasi; sikap takut; penurunan mutu; tidak sopan; diskriminasi; dramatisasi; sulit

dijangkau; sikap tidak acuh; tidak disiplin; kaku; tidak berperike-manusiaan; tidak peka; tidak sopan; tidak peduli tindak; salah tindak; semangat yang salah tempat; negativisme; melalaikan tugas; tanggungjawab rendah; lesu darah; paparazi; melaksanakan kegiatan yang tidak relevan; utamakan kepentingan sendiri; suboptimal; imperatif wilayah kekuasaan; tidak profesional; sikap tidak wajar; melampaui wewenang; vested interest; dan pemborosan.

5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan, seperti: penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat; kewajiban sosial sebagai beban; eksploitasi; tidak tanggap; pengangguran terselubung; motivasi yang tidak tepat; imbalan yang tidak memadai; kondisi kerja yang kurang memadai; pekerjaan tidak kompatibel; tidak adanya indikator kinerja; miskomunikasi; misinformasi; beban kerja yang terlalu berat; terlalu banyak pegawai; sistem pilih kasih; sasaran yang tidak jelas; kondisi kerja yang tidak nyaman; sarana dan prasarana yang tidak tepat; dan perubahan sikap yang mendadak.

## **TERAPI PATOLOGI BIROKRASI**

Pepatah Arab mengatakan: Likuli Daain Dawaaun (setiap penyakit pasti ada obatnya). Begitu pula dalam hal patologi birokrasi pasti ada obatnya, meskipun tak semujarab obat flu atau pilek yang sering dikonsumsi masyarakat pada umumnya.

Bertitik tolak dari masalah tersebut, penulis mencoba memberikan resep obat untuk menanggulangi penyakit birokrasi ,

sekalipun dengan obat ini penyakit tersebut tidak akan sembuh secara keseluruhan, paling tidak dapat mengurangi atau mencegah serta menghambat timbulnya penyakit tersebut.

Contoh kutipan Lord Acton: "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely" secara implisit menjelaskan hubungan bagaimana seseorang yang berkuasa terlalu lama akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan kekuasaannya, manifestasinya dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga langkah strategi *pertama* yang harus diambil adalah menenpatkan para birokrat yang sudah terlalu lama berkuasa berkecimpung di dalam urusan pelayanan ke posisi yang lain (*tour of duty*), baik itu rotasi horizontal maupun promosi vertikal. Langkah strategi yang *kedua* adalah dengan sedini mungkin mengenalkan teknologi informasi di lingkungan pemerintah. Yaitu dengan cara menghindarkan interaksi/transaksi uang cash antara pelanggan dan pelayan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa semakin sering seseorang mengadakan kontak langsung dengan uang tunai, semakin besar pula kesempatan orang tersebut untuk mengadakan/berbuat korupsi, kolusi dan nepotisme. Contoh konkret yang mungkin bisa diaplikasikan adalah dengan pengadaan mesin pencetak perangko ataupun kupon sebagai pengganti uang tunai seperti yang telah dilaksanakan di Jepang. Maksudnya, setiap formulir aplikasi permohonan pelayanan hanya butuh sehelai perangko atau kupon bertuliskan besaran biaya yang dibutuhkan untuk proses penyelesaiannya. Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa seseorang yang bertugas melayani pelanggan tidak akan disibukkan atau direpotkan dengan urusan uang tunai disekitar loket mereka. Mereka hanya akan berkonsentrasi disepertaran urusan administrasi perurusan saja, tidak ada yang lain. Hal ini cukup efektif

dalam menekan angka kolusi di Jepang yang biasa disebut dalam ungkapan “*shuden no shita*” artinya lengan baju bawah baju kimono (Wordpress.Com/ 2007).

Berikutnya, penulis menawarkan cara pengobatan patologi birokrasi dengan pendekatan *good governance*. Penulis berasumsi atau berkeyakinan konsep ini bisa menyembuhkan atau setidaknya dapat mengurangi penyakit birokrasi.

*Good governance* diartikan “kepemerintahan yang baik”. Secara konseptual pengertian “baik” mengandung dua pemahaman. *Pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, keman-dirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sjamsuddin, 2007).

Konsep “kepemerintahan yang baik” berorientasi pada dua hal, yaitu: *Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Hal ini mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan elemen-elemen konstituen atau pemilihnya, seperti: legitimasi, akuntabilitas, otonomi dan devolusi kekuasaan kepada daerah, serta adanya jaminan berjalannya mekanisme kontrol oleh masyarakat. *Kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam konteks *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan perlu ada unsur-unsur yang dilibatkan. Unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UNDP terdiri atas tiga macam, yaitu *the state, the private sector, dan civil society organization* (Widodo dalam Ismail.2009).

### ***The State***

Diantara tugas terpenting negara pada masa depan yang diciptakan oleh lingkungan politik adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan meredefinisi peran pemerintahan dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi, melindungi lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat, menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas administratif pemerintah lokal, kota, dan metropolitan.

Institusi pemerintah akan memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan, memelihara harmonisasi sosial, ketertiban dan keamanan, stabilitas kondisi makro ekonomi, meningkatkan penerimaan keuangan dan menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur yang esensial, memelihara standar keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan biaya yang dapat dijangkau, mengatur aktivitas ekonomi yang bersifat *natural monopolies* atau yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umum bagi warga negara. Institusi pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat. Mereka diharapkan memberikan layanan untuk menyediakan kesempatan yang sama dan menjamin inklusivitas sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi yang kondusif yang

terdiri atas sistem fungsi legislasi dan proses pemilihan yang tepat, legal, dan yudisial.

### ***The Private Sector***

Sektor swasta jelas telah memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi, yakni ketika produksi barang dan jasa berjalan dengan baik. Pendekatan tersebut mendapatkan dukungan dari lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas sektor swasta dan dalam suatu bingkai kerja *incentives and rewards* secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik.

### ***Civil Society Organization***

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan, bukan hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan. Akan tetapi, juga tergantung kepada organisasi masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi sosial politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas

Sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan *check and balances* terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta. Akan tetapi, mereka juga dapat memberikan kontribusi pada (dan memperkuat) kedua unsur utama yang lain. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan

membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa good governance mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian diharapkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan dapat dieliminir. Untuk itu pola dan gaya pemerintah harus segera dibenahi dan dikembangkan dengan menggunakan konsep good governance sebagaimana diuraikan oleh Stoker dalam Sjamsiar (2007) dalam lima proposisi pemerintahan yang baik (good governance) sebagai berikut:

1. *Governance refers to a complex set of situation and actors that are drawn from but also beyond government* (kepemerintahan mengacu pada seperangkat institusi yang kompleks dan para pelaku yang terbentuk dari pemerintah maupun luar pemerintah).
2. *Governance recognizes the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social and economic issues* (kepemerintahan mencermati pengaburan batasan-batasan dan pertanggungjawaban untuk pemecahan sosial dan ekonomi).
3. *Governance identifies the power dependence involved in the relationships between institution involved in collection action* (kepemerintahan mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan di antara institusi dalam tindakan bersama).

4. *Governance is about autonomous self governing networks of actors* (kepemerintahan merupakan hal penentuan jaringan kerja sendiri dari para pelaku yang bersifat otonom).
5. *Governance recognizes the capacity to get thing done which does not rest on the power of government to command or use its authority. It sees government as able to used new tools and techniques to steer and guide* (kepemerintahan mencermati kapasitas untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikerjakan dimana tidak menyadarkan pada kekuasaan pemerintah untuk mengomando atau menggunakan otoritasnya. Kepemerintahan melihat pemerintah sebagai kemampuan untuk menggunakan alat dan teknik baru dalam menjalankan dan membimbing).

Dengan merujuk pada kelima proposisi tersebut, Islamy dalam Sjamsiar (2007) memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan mutu pemerintahan di Indonesia perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Memanfaatkan seperangkat institusi dan aktor baik dari dalam maupun dari luar birokrasi pemerintahan. Pemerintah tidak perlu alergi atau curiga terhadap eksistensi berbagai macam institusi dan aktor diluar institusi pemerintah, bahkan sebaliknya hal itu bisa dimanfaatkan sebagai komponen penguat dalam menca[pa]i tujuan bersama;
2. Trikotomki peran sektor pertama (pemerintah “plus” legislatif), sektor kedua (swasta) dan sektor ketiga (masyarakat) untuk menangani masalah-masalah sosial ekonomi tidak perlu terjadi, karena peran mereka itu

sekarang telah demikian membaur/kabur. Ketiga kekuatan tersebut seyogianya menyatu dan padu, mempunyai kepentingan dan komitmen yang sama tingginya atau mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi tersebut;

3. Adanya saling ketergantungan di antara ketiga kekuatan tersebut dan peran bersama (*collective action*). Tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak perlu ada satu kekuatan manapun yang dominan melebihi yang lain. Semuanya berinteraksi dan berinterelasi serta punya akses yang sama dalam berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
4. Walaupun masing-masing kekuatan tersebut di atas (pemerintah dan legislatif, swasta, dan masyarakat) telah memiliki jaringan kerja, tetapi begitu mereka menyatu dalam suatu ikatan kepentingan bersama (*partner-ship*), maka mereka akan membentuk jaringan kerja sendiri yang otonom dan kuat dalam mempengaruhi dan menjalankan urusan pemerintahan. Institusi-institusi dan aktor-aktor dari ketiga kekuatan tersebut akan menjadi kekuatan yang dahsyat dan solid bila mereka bersedia memberikan dan memanfaatkan kontribusi, baik sumber-sumber, keahlian, dan tujuan-tujuan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Kapasitas untuk mencapai tujuan (misalnya, membangun masyarakat sejahtera) tidak mungkin hanya menggantungkan diri dari komando dan penggunaan otoritas pemerintahan, tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan teknik pemerintahan yang baru, yaitu

kemampuan membuat kebijakan dasar yang baik dan benar. Pemerintah tidak perlu memonopoli pembuatan kebijakan dasar tersebut, ia hanya perlu mengajak dan memberikan kesempatan aktor-aktor lain untuk ikut berperan serta dalam proses kebijakan. Peran pemerintah cukup sebagai *catalytic, agent, dan komisioner* yang memberikan arahan (*more steering*) dan tidak perlu menjalankannya sendiri (*less rowing*) proses kebijakan tersebut.

## **PENUTUP**

Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, dan negatif. Citra buruk atau negatif tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam bentuknya, lambatnya pelayanan, dan di ikuti dengan prosedur yang berbelit-belit dan lain sebagainya. Sehingga keadaan tersebut merusak hubungan antara manusia, menghancurkan komunitas politik, dan meluluhlantakkan cita-cita negara hukum (Indrayana, 2008).

Diagnosis terhadap patologi birokrasi di Indonesia sebenarnya sudah lama dilakukan. Bahkan, setiap masyarakat selalu merasakan dampak dari penyakit birokrasi dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Akan tetapi, tampaknya seperti orang yang sudah mengalami ketergantungan pada obat, tidak mudah mengatasi penyakit-penyakit birokrasi tersebut. Problem dasar yang kita hadapi adalah komitmen politik untuk melakukan terapi terhadap penyakit tersebut.

Munculnya korupsi ala GAYUS yang telah menjadi isu nasional harus bisa dijadikan sebagai momentum pengobatan penyakit birokrasi secara menyeluruh. Perintah Presiden (Media Indonesia, 2010) untuk mengungkap tuntas kasus mafia pajak dan mafia kasus tidak boleh hanya berhenti sekadar sebagai sindrom paruh waktu, tetapi harus terus bergulir menjadi semangat dan gerakan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Karena pada dasarnya korupsi (atau turunannya) yang terjadi dalam birokrasi tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga melibatkan penegak hukum dan juga politisi, maka pengobatan atau terapi reformasi birokrasi harus dilakukan secara radikal.

Reformasi birokrasi harus meliputi pengawasan yang ketat dan konsisten terhadap para pejabat birokrasi, pejabat penegak hukum, dan juga politisi dengan metode pembuktian terbalik atas kekayaan yang dimilikinya. Pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar dibandingkan penghasilannya sebagai pegawai negeri atau politisi, harus dapat membuktikan asal-usul kekayaannya tersebut. Pada sisi yang lain, promosi jabatan dalam birokrasi harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan catatan kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh seorang birokrat. Berbagai perbaikan sistem yang radikal ini diharapkan dapat menjadi obat pamungkas untuk mengurangi patologi dalam birokrasi. Sehingga terbentuk pemerintah yang bersih dan berwibawa, berwawasan, demokratis, responsif dan berakhlak mulia (Thoah, 1997).

## DAFTAR PUSTAKA

- Indrayana, Denny. 2008, *Negeri Para Mafioso (Hukum di sarang Koruptor)*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Ismail, H.M. 2009, *Politisasi Birokrasi*, Malang: Ash-Shiddiqy Press.
- Prasojo, Eko. 2010, *Gayus dan Patologi Birokrasi*, Jakarta: Kompas
- Siagian, Sondang, P. 1994, *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2007. "*Good Governance*" *Jurnal Ilmiah Administrasi publik Vol V,III* Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- \_\_\_\_\_. 2007, *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*, Malang: Yayasan Pembangunan Nasional.
- Teruna, Made. 2007, "*Patologi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*". Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Thoha, Miftah. 1999, "*Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintahan Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi*", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
- [http://v318.wordpress.com/2007/11/08/Patologi Birokrasi](http://v318.wordpress.com/2007/11/08/Patologi-Birokrasi).

---

\*) Drs. H. Mu'min Ma'ruf, SH. M.Si

Adalah Dosen IPDN.